



Membangun Kebijakan Publik yang Tangguh: Pembelajaran dari Pandemi COVID-19 di Indonesia

Alexander Kennedy

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

Correspondence: * 01053230105@student.uph.edu

Abstract

Research Aims: This study seeks to evaluate whether Indonesia's experience in facing the COVID-19 pandemic has led to a stronger and more resilient public policy formulation. It aims to explore how the crisis influenced cross-sector collaboration, transparency in communication, and flexibility in policymaking. **Design/Methodology/Approach:** Using a normative juridical approach, the research analyzes primary, secondary, and tertiary legal materials. This method enables a legal framework-based examination of policy responses and their evolution during and after the pandemic. **Research Findings:** The analysis reveals that the pandemic pushed the Indonesian government to improve inter-agency coordination, strengthen public communication strategies, and involve the community more actively in policymaking. These changes reflect an integration of lessons learned from the crisis into public policy principles such as transparency, good governance, and effective public service delivery. **Conclusion:** The experience of managing the COVID-19 crisis has shaped a more responsive, transparent, and inclusive approach to public policy formulation in Indonesia. This transformation enhances the country's readiness to address future challenges through resilient governance practices.

Keywords: Public Policy, Covid-19, Policy Flexibility, Legal Politics.

Abstrak

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah pengalaman Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 telah menghasilkan perumusan kebijakan publik yang lebih kuat dan tangguh. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana krisis tersebut memengaruhi kolaborasi lintas sektor, transparansi dalam komunikasi, dan fleksibilitas dalam pembuatan kebijakan. **Desain/Methodologi/Pendekatan:** Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan ini memungkinkan pemeriksaan respons kebijakan dan perkembangannya selama dan setelah pandemi berdasarkan kerangka hukum. **Temuan Penelitian:** Hasil analisis menunjukkan bahwa pandemi mendorong pemerintah Indonesia untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga, memperkuat strategi komunikasi publik, dan melibatkan masyarakat secara lebih aktif dalam proses pembuatan kebijakan. Perubahan ini mencerminkan integrasi pelajaran yang diperoleh dari krisis ke dalam prinsip-prinsip kebijakan publik, seperti transparansi, tata kelola yang baik, dan pelayanan publik yang efektif. **Kesimpulan:** Pengalaman dalam mengelola krisis COVID-19 telah membentuk pendekatan perumusan kebijakan publik di Indonesia yang lebih responsif, transparan, dan inklusif. Transformasi ini meningkatkan kesiapan negara dalam menghadapi tantangan di masa depan melalui praktik pemerintahan yang tangguh.

Kata kunci: Kebijakan Publik, Covid-19, Fleksibilitas Kebijakan, Politik Hukum.



I. Pendahuluan

Kebijakan publik adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menangani masalah sosial dan diimplementasikan oleh para pelaku kebijakan publik dengan keterlibatan *elite* politik (B. L. Anggraini & Kurniawan, 2021). Subahan et al. (2021) mendefinisikannya sebagai serangkaian tindakan yang dirumuskan oleh lembaga pemerintah atau pejabat. Secara mendasar, kebijakan publik merujuk pada prinsip atau tindakan yang dipilih untuk membimbing proses pengambilan keputusan (Aulia et al., 2021). Dengan kata lain, kebijakan publik adalah pedoman bagi otoritas pemerintah dalam menjalankan perannya untuk melindungi kepentingan publik. Kebijakan publik tidak hanya terbatas pada tahap implementasi, tetapi juga melibatkan komunikasi kepada kelompok sasaran kebijakan serta pemangku kepentingan lainnya. Komunikasi yang baik menjadi krusial agar kebijakan dapat dimengerti, diterima, dan dijalankan sesuai dengan maksud aslinya (B. L. Anggraini & Kurniawan, 2021).

Tujuan utama kebijakan publik adalah menjaga kesejahteraan masyarakat. Konsep dasar kebijakan pemerintah adalah untuk mengatur kepentingan publik atau masyarakat umum (N. P. A. S. Dewi et al., 2019). Selain itu, kebijakan publik juga memastikan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya agar tidak terjadi penyalahgunaan untuk kepentingan individu atau golongan tertentu dan pada akhirnya akan bermuara dalam menjaga kesejahteraan sosial dengan menangani berbagai kebutuhan dan ketimpangan di antara kelompok sosial.

Proses pembentukan kebijakan publik dimulai dengan identifikasi masalah, penentuan agenda kebijakan, perumusan alternatif solusi, pemilihan dan pengesahan kebijakan, hingga implementasi dan evaluasi. Liu menyatakan bahwa definisi masalah dan pembangkitan solusi memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas dan relevansi kebijakan yang dihasilkan (Liu et al., 2017). Agenda kebijakan diprioritaskan berdasarkan kepentingan nasional dan tingkat urgensi masalah.

Persepsi masyarakat terhadap isu-isu publik serta kaitannya dengan masalah sosial lainnya secara signifikan mempengaruhi preferensi kebijakan individu warga (Madani, 2018). Artinya, tingkat pemahaman dan penerimaan publik terhadap suatu kebijakan memainkan peran besar dalam keberhasilan implementasinya. Di samping itu, perubahan sosial yang cepat, dinamika politik, serta konflik kepentingan antara kelompok yang berbeda dapat menjadi hambatan serius dalam mencapai tujuan kebijakan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus mengembangkan kebijakan berdasarkan data yang relevan, mendengarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, dan menyesuaikannya dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Selain itu, proses evaluasi yang baik juga penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap efektif dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, kebijakan publik adalah langkah-langkah yang dirancang dan diimplementasikan oleh pemerintah guna menangani masalah sosial dan melindungi kepentingan publik. Komunikasi yang efektif, akuntabilitas, serta pemahaman yang mendalam mengenai masalah sosial yang dihadapi menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan publik (Kennedy, 2023). Tantangan yang dihadapi dalam perumusan dan implementasi kebijakan harus diatasi dengan analisis mendalam dan partisipasi publik untuk mencapai kesejahteraan sosial secara lebih merata. Dengan memperhatikan setiap elemen penting dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik, pemerintah dapat menjaga relevansi, efektivitas, dan keberlanjutan dari setiap kebijakan yang diterapkan.

Menanggapi perubahan dalam perumusan kebijakan pasca pandemi, beberapa studi memberikan wawasan tentang adaptasi yang diperlukan. Hermawan membahas reorientasi kebijakan pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan pandemi, menyoroti pentingnya kesiapan teknologi dan globalisasi dalam membentuk kebijakan pendidikan pasca pandemi (Hermawan et al., 2021). Perubahan drastis dalam metode dan sarana pembelajaran telah mendorong lembaga pendidikan untuk meninjau ulang strategi mereka dalam mengatasi kesenjangan digital dan memastikan akses yang setara bagi semua peserta didik. Sebagai tambahan, Fathurrohman dan Rizqi juga menganalisis perubahan kebijakan perlindungan sosial di Indonesia selama krisis Covid-19, memberikan pemahaman mengenai pergeseran fokus kebijakan (Fathurrohman & Rizqi, 2021). Mereka menyoroti perlunya kebijakan perlindungan sosial yang lebih adaptif dan responsif terhadap kondisi masyarakat yang dinamis selama masa krisis. Selain itu, Saadah menggambarkan bagaimana perubahan sosial di antara komunitas nelayan terjadi akibat rekayasa sosial pandemi Covid-19, menekankan pentingnya adaptasi kebijakan dalam menanggapi krisis (Saadah, 2022).

Dampak pandemi telah menyebabkan perubahan pola mata pencaharian dan hubungan sosial, yang memaksa komunitas nelayan untuk mencari strategi bertahan hidup baru dan pemerintah untuk merespons perubahan kebutuhan mereka dengan lebih cepat dan efektif. Firmansyah mengeksplorasi pendidikan karakter siswa pasca pandemi, menunjukkan pergeseran signifikan dalam praktik dan kebijakan pendidikan setelah pandemik (Firmansyah et al., 2022). Perubahan ini termasuk adaptasi kurikulum yang mendukung pembelajaran jarak jauh dan penerapan nilai-nilai karakter yang lebih kontekstual, agar siswa dapat berkembang di lingkungan yang lebih fleksibel dan kompleks. Studi-studi ini secara kolektif menegaskan perlunya penyesuaian kebijakan di berbagai sektor untuk menghadapi tantangan dan perubahan yang dibawa oleh pandemi Covid-19. Adaptasi kebijakan yang responsif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta didukung oleh data dan evaluasi yang komprehensif, sangat diperlukan untuk menghadapi krisis yang mungkin terjadi di masa depan.

Untuk membangun sistem perumusan kebijakan publik yang kuat pasca pandemi, penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang disorot dalam literatur. Pertama, transparansi informasi publik sangat penting dalam memahami penyebaran virus dan memastikan implementasi kebijakan yang efektif (Ristyawati, 2020). Hal ini memungkinkan otoritas untuk menyampaikan informasi yang akurat dan relevan kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengambil langkah pencegahan yang tepat dan mendukung kebijakan yang diterapkan.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi alat penting dalam mendistribusikan informasi, menganalisis masalah, dan merencanakan masa depan, yang semuanya adalah komponen penting dalam perumusan kebijakan (Achmad, 2021). TIK dapat mempercepat proses penyebaran informasi, meningkatkan koordinasi antar-pemangku kepentingan, dan menyediakan data yang akurat untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Di samping itu, pendapat publik juga harus dipertimbangkan selama proses perumusan kebijakan agar kebijakan tersebut efektif dan diterima oleh masyarakat luas (Septa & Kusumasari, 2023). Keterlibatan masyarakat akan memastikan bahwa kebijakan tersebut relevan dengan kebutuhan mereka, meningkatkan akuntabilitas, dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Penerapan *e-government* dapat menyederhanakan proses implementasi dan perumusan kebijakan dengan menawarkan opsi perencanaan langsung atau perumusan kebijakan turunan (Arifin, 2021). Ini memungkinkan pemerintah untuk mengurangi biaya administrasi, meningkatkan aksesibilitas layanan, dan memberikan respons lebih cepat terhadap perubahan situasi. Selain itu, mengoptimalkan sistem pangan berkelanjutan, mengurangi limbah makanan, dan meningkatkan kapasitas pertanian lokal adalah langkah-langkah penting untuk memperkuat ketahanan pangan pasca pandemi (Raisa et al., 2021). Pandemi telah menunjukkan perlunya memastikan ketersediaan dan aksesibilitas pangan yang cukup melalui peningkatan efisiensi rantai pasokan dan pemberdayaan petani lokal. Mengedukasi generasi muda tentang pilihan makanan sehat juga dapat membantu membangun komunitas yang tangguh di tengah krisis seperti COVID-19 (Oktavia, 2023).

Selain itu, penyesuaian layanan publik selama tindakan pembatasan sosial mungkin menyulitkan masyarakat, tetapi penting untuk membatasi penyebaran penyakit seperti virus COVID-19 (Oktarina et al., 2021). Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan pembatasan sosial tidak menghambat akses layanan publik yang penting dan menyediakan solusi alternatif untuk kelompok yang rentan. Intervensi aktor juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi perumusan kebijakan lingkungan, menekankan pentingnya berbagai pemangku kepentingan dalam membentuk kebijakan publik (Pritasari & Kusumasari, 2019). Dukungan dan kolaborasi dari sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga internasional dapat memperkaya proses perumusan kebijakan dan memberikan perspektif yang lebih luas dalam mengatasi masalah lingkungan yang kompleks.

Kolaborasi antara para pembuat kebijakan, pemanfaatan konsep kebijakan secara efektif, dan kolaborasi kognitif sangat penting untuk perumusan kebijakan berkualitas tinggi (H. Anggraini et al., 2022). Sinergi ini akan meningkatkan kualitas analisis kebijakan, memperkuat integrasi berbagai sektor, dan memastikan bahwa kebijakan tersebut tepat sasaran serta dapat diimplementasikan dengan baik.

Dengan demikian, pentingnya transparansi, pemanfaatan TIK, pertimbangan pendapat publik, penerapan *e-government*, sistem pangan berkelanjutan, pendidikan, keterlibatan pemangku kepentingan, dan kolaborasi efektif adalah hal yang sangat diperlukan dalam merumuskan kebijakan publik yang kuat pasca pandemi. Pemerintah harus menerapkan pendekatan komprehensif dan inklusif untuk memastikan kebijakan yang dirumuskan dapat memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat dan meminimalkan dampak negatif dari krisis yang mungkin terjadi di masa depan.

Masalah yang dihadapi dalam perumusan kebijakan publik pasca pandemi adalah apakah pengalaman menghadapi pandemi COVID-19 telah membentuk formulasi kebijakan publik yang lebih kuat di Indonesia? Hal ini mencakup evaluasi sejauh mana pembelajaran selama krisis mampu mendorong pemerintah untuk mengembangkan kebijakan yang lebih tanggap, transparan, dan inklusif dalam mengatasi masalah yang kompleks. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah pengalaman menghadapi pandemi COVID-19 telah menghasilkan formulasi kebijakan publik yang lebih kuat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menilai perubahan dalam pendekatan pemerintah terhadap perumusan kebijakan, khususnya dalam

hal responsivitas, transparansi, dan inklusivitas, di berbagai sektor. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang muncul dari pengalaman selama pandemi serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan yang lebih adaptif dan efektif dalam menghadapi krisis di masa depan.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis masalah hukum berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku (Sonata, 2015). Metode yuridis normatif menekankan pada studi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, dan putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian (Soekanto & Mamudji, 2024). Sumber ini digunakan sebagai dasar utama untuk mengidentifikasi dan menganalisis norma hukum yang berlaku. Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur hukum, artikel ilmiah, pendapat ahli, dan publikasi terkait yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks hukum digunakan sebagai pelengkap untuk memperkuat validitas analisis.

Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dokumen-dokumen hukum yang relevan (Sunggono, 2019). Analisis yang digunakan bersifat kualitatif, di mana data yang diperoleh dianalisis secara mendalam untuk menemukan, menjelaskan, dan mengevaluasi norma hukum yang berlaku serta relevansinya terhadap isu yang dikaji.

Penelitian ini juga menggunakan teknik interpretasi hukum untuk memahami maksud dan tujuan dari norma-norma hukum yang dianalisis (Soekanto & Mamudji, 2024). Teknik ini mencakup interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai aturan hukum yang terkait.

Hasil analisis dalam penelitian ini disusun secara deskriptif-analitis, di mana penelitian tidak hanya memaparkan norma hukum yang berlaku tetapi juga mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap permasalahan hukum yang diangkat (Ismail & Ilyas, 2023). Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dan praktis terhadap pengembangan ilmu hukum serta solusi terhadap isu hukum yang dibahas.

III. Hasil dan Pembahasan

Formulasi Kebijakan Publik Sebelum Covid-19

Dalam merumuskan kebijakan publik sebelum pandemi COVID-19, berbagai studi dan analisis telah memberikan wawasan berharga mengenai proses dan pertimbangan yang terlibat. Perumusan kebijakan publik, terutama dalam menanggapi krisis potensial seperti pandemi, memerlukan analisis pilihan rasional. Hal tersebut mencakup pemahaman tentang keberpihakan yang mungkin ada dalam perspektif dan persepsi kebijakan, yang bisa memengaruhi implementasi dan hasil kebijakan (Agustino, 2020). Di samping itu, keterlibatan berbagai aktor, baik dari sektor publik maupun swasta, dalam proses perumusan kebijakan adalah aspek yang sangat penting untuk memastikan respons komprehensif dan implementasi kebijakan yang efektif.

Transparansi dalam kebijakan publik memainkan peran kunci dalam menangani krisis seperti pandemi COVID-19. Penelitian menunjukkan bahwa transparansi publik dalam manajemen bencana, terutama di tingkat pemerintah daerah, sangat penting untuk respons dan komunikasi yang efektif. Pendekatan ini memfasilitasi penyampaian informasi yang akurat dan relevan kepada masyarakat sehingga mereka dapat memahami risiko dan tindakan yang perlu diambil (Widyaningrum & Utama, 2022). Selain itu, peran jaringan pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan, seperti yang terlihat dalam respons COVID-19 di Indonesia, menyoroti pentingnya koordinasi upaya lintas sektor yang dipandu oleh kebijakan yang terperinci dan terstruktur dengan baik.

Menanggapi pandemi COVID-19, langkah awal yang diambil pemerintah Indonesia adalah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk membatasi mobilitas masyarakat dan menekan penyebaran

virus. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan, tetapi juga pada stabilitas ekonomi dan kelangsungan layanan publik guna memastikan bahwa upaya mitigasi tidak berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Kennedy et al., 2024). Selain itu, pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagai otoritas koordinasi nasional yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan respons dan penyediaan layanan kesehatan. Penyesuaian anggaran juga dilakukan untuk memastikan ketersediaan dana darurat dalam mendukung penanganan pandemi.

Evaluasi terhadap kebijakan ini menunjukkan bahwa penerapan PSBB berhasil menekan laju penyebaran virus di beberapa wilayah, meskipun dengan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda. Di kota-kota besar seperti Jakarta, pengawasan ketat dan pengaturan mobilitas yang diterapkan melalui PSBB membantu menekan angka penularan. Namun, di wilayah yang lebih terpencil, tantangan dalam pengawasan serta tingkat kepatuhan masyarakat yang lebih rendah menyebabkan penyebaran tetap berlangsung meski dengan kecepatan yang lebih lambat.

Selain dampaknya terhadap kesehatan, kebijakan pembatasan sosial juga membawa dampak ekonomi yang signifikan. Beberapa sektor industri mengalami kerugian besar, terutama sektor informal dan UMKM yang tidak siap menghadapi perubahan mendadak ini (P. S. Dewi, 2021). Pemerintah berupaya meredam dampak ini melalui berbagai program bantuan sosial dan stimulus ekonomi, meski implementasinya tidak selalu optimal karena tantangan distribusi dan validasi data penerima.

Selain itu, strategi komunikasi yang diterapkan oleh pemerintah, seperti yang diamati di berbagai daerah seperti Kota Surabaya dan Bali, dimana sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dan mematuhi kebijakan-kebijakan yang ada (Sulistiyowati, 2021). Hal tersebut membantu meningkatkan kepatuhan publik terhadap langkah-langkah pengendalian pandemi serta memastikan bahwa pesan yang disampaikan jelas dan konsisten.

Secara keseluruhan, perumusan kebijakan publik sebelum pandemi COVID-19 memerlukan analisis rasional yang matang, pertimbangan individu yang mungkin mempengaruhi keputusan, keterlibatan berbagai aktor, serta fokus pada transparansi dan strategi komunikasi yang tepat. Evaluasi kebijakan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih terkoordinasi dan komprehensif untuk merespons situasi pandemi, agar kebijakan yang diterapkan memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan sosial.

Formulasi Kebijakan Publik Setelah COVID-19

Pengalaman pandemi COVID-19 di Indonesia telah memberikan sejumlah pembelajaran penting yang dapat memandu perumusan kebijakan publik di masa depan. Pertama, koordinasi antar-lembaga dan lintas sektor perlu diperkuat untuk memastikan respons terpadu dalam menghadapi krisis (Agustino, 2020). Sebagai contoh, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam menangani krisis di tingkat nasional dan daerah telah menyoroti pentingnya kerja sama dalam mempercepat distribusi sumber daya, komunikasi, dan implementasi kebijakan. Kolaborasi lintas sektor mampu meningkatkan efektivitas kebijakan, terutama dalam kondisi darurat.

Komunikasi yang jelas dan transparan juga merupakan kunci untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan. Penelitian oleh Sulistiyowati menyoroti pentingnya strategi komunikasi pemerintah dalam menghadapi pandemi, terutama dalam memberikan informasi yang akurat tentang langkah-langkah pembatasan sosial, manfaat vaksinasi, dan penanganan kesehatan. Ketidaktepatan informasi di awal pandemi sempat memicu kebingungan di antara masyarakat, namun kampanye komunikasi yang konsisten kemudian berhasil meningkatkan pemahaman dan partisipasi publik.

Keterlibatan masyarakat dalam mendukung kebijakan menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas. Inisiatif seperti *urban farming* menunjukkan bahwa upaya masyarakat dalam mempertahankan ketersediaan pangan selama pandemi berkontribusi pada ketahanan komunitas lokal (Sista & Azhari, 2022). Di sisi lain, Fleksibilitas juga diperlukan dalam perumusan kebijakan. Kebijakan seperti restrukturisasi kredit serta penyesuaian layanan publik selama pembatasan sosial merupakan contoh kebijakan yang disesuaikan dengan cepat untuk menangani dampak pandemi terhadap ekonomi dan masyarakat (Kholiq & Rahmawati, 2020).

Fleksibilitas ini memungkinkan pemerintah untuk lebih responsif terhadap perubahan situasi dan kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, pembelajaran utama dari pandemi COVID-19 di Indonesia menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor, komunikasi transparan, keterlibatan masyarakat, fleksibilitas kebijakan, dan analisis data dalam menghadapi krisis kesehatan dan ekonomi. Pembelajaran tersebut harus diintegrasikan ke dalam perumusan kebijakan publik di masa mendatang untuk memperkuat kesiapsiagaan terhadap tantangan serupa.

Prinsip Kebijakan Publik yang Tangguh

Prinsip kebijakan publik yang kokoh melibatkan aspek-aspek penting seperti transparansi, tata kelola, pemerintahan yang baik, dan pelayanan publik yang efektif. Transparansi telah terbukti menjadi strategi yang efektif dalam menanggulangi pandemi COVID-19, seperti yang dilakukan oleh Tiongkok, Korea Selatan, Taiwan, Vietnam, dan Kanada. Negara-negara tersebut menekankan pentingnya akses informasi publik yang jelas, memberikan data mengenai penyebaran virus secara terbuka dan mendorong kerja sama publik (Muis, 2020). Di Indonesia, transparansi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesadaran publik akan protokol kesehatan dan menanggapi disinformasi terkait pandemi.

Tata kelola kebijakan publik mencakup evaluasi kebijakan untuk memastikan bahwa implementasinya sesuai dengan regulasi dan undang-undang yang berlaku. Evaluasi yang komprehensif memungkinkan pemerintah memahami kekuatan dan kelemahan kebijakan sehingga perbaikan bisa dilakukan. Evaluasi ini juga menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam pemerintahan. Pemerintahan yang baik menuntut tidak hanya transparansi, tetapi juga penerapan nilai-nilai etis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat membutuhkan kemauan politik serta tindakan nyata dalam melaksanakannya (Suryono, 2018). Sebagai contoh, Kota Makassar menerapkan prinsip "empat tepat," yaitu menjawab permasalahan dengan tepat, pelaksanaan yang tepat, sasaran yang tepat, dan lingkungan yang tepat dimana strategi tersebut dinilai berhasil meningkatkan efektivitas pelayanan publik (Ishak et al., 2022).

Nilai-nilai publik juga memegang peran penting dalam kebijakan publik. Nilai ini memberikan konsensus normatif mengenai hak, kewajiban, dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi pemerintah dan kebijakan yang diambil (Nursalam, 2021). Nilai publik juga membentuk persepsi masyarakat mengenai legitimasi dan keadilan dari kebijakan yang diimplementasikan. Perumusan kebijakan publik yang kokoh membutuhkan pemahaman mendalam mengenai lingkaran kebijakan yang meliputi agenda setting, perumusan, implementasi, evaluasi, perubahan, dan penghentian kebijakan (Marsari et al., 2021). Masing-masing tahap memerlukan pendekatan berbeda dan harus didasarkan pada bukti serta analisis data. Dalam pembangunan daerah, prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, seperti transparansi dan tanggung jawab, harus diterapkan secara efektif.

Dengan demikian, prinsip kebijakan publik yang kokoh melibatkan transparansi, tata kelola yang baik, pelayanan publik yang efektif, serta nilai-nilai publik yang memberikan dasar moral bagi kebijakan. Semua komponen ini bekerja secara sinergis, memungkinkan perumusan kebijakan yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

IV. Penutup

Pandemi COVID-19 telah membawa tantangan yang monumental bagi perumusan kebijakan publik di Indonesia. Namun, dari krisis ini, muncul berbagai pembelajaran yang berharga yang dapat membimbing langkah-langkah ke depan dalam membangun kebijakan publik yang lebih tangguh. Salah satu pembelajaran utama adalah pentingnya kolaborasi lintas sektor. Kolaborasi ini tidak hanya mencakup kerja sama antara lembaga pemerintah, tetapi juga melibatkan sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum. Sinergi ini telah terbukti mampu meningkatkan efektivitas respons terhadap krisis, mempercepat distribusi sumber daya, dan memastikan implementasi kebijakan yang lebih holistik dan terpadu.

Selain kolaborasi lintas sektor, komunikasi yang jelas dan transparan juga menjadi fondasi penting dalam membangun kebijakan publik yang tangguh. Pandemi ini menunjukkan bahwa informasi yang tepat waktu,

akurat, dan mudah dipahami adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan yang diterapkan. Strategi komunikasi yang efektif telah membantu mengurangi tingkat kebingungan dan ketidakpastian di kalangan masyarakat, sehingga memperkuat kesiapan mereka dalam menghadapi situasi yang kompleks dan berubah-ubah.

Selanjutnya, keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan menjadi krusial dalam memastikan kebijakan yang diterapkan relevan dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Inisiatif dari masyarakat seperti urban farming dan partisipasi aktif dalam kampanye vaksinasi telah membuktikan bahwa masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat ketahanan komunitas lokal dan mendukung upaya pemerintah dalam menanggapi krisis dengan lebih efektif.

Fleksibilitas kebijakan juga menjadi salah satu pelajaran penting dari pandemi ini. Dalam menghadapi situasi yang serba dinamis, kebijakan yang dapat menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan situasi dan kebutuhan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan efektivitas respons pemerintah. Kemampuan untuk merevisi kebijakan secara adaptif dan responsif adalah aset berharga dalam menjaga keberlanjutan dan relevansi kebijakan publik di tengah tantangan yang tidak terduga.

Terakhir, analisis data yang cermat dan berbasis bukti menjadi landasan yang kuat untuk merumuskan kebijakan publik yang efektif. Pandemi ini menegaskan pentingnya pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang akurat dalam membimbing pengambilan keputusan. Analisis data yang mendalam dapat memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika situasi, respons masyarakat, dan dampak kebijakan yang diimplementasikan, sehingga memungkinkan pemerintah untuk mengambil tindakan yang lebih tepat dan efektif dalam menanggapi krisis.

Secara keseluruhan, pandemi COVID-19 telah menjadi pelajaran yang berharga bagi Indonesia dalam membangun kebijakan publik yang lebih tangguh. Dengan mengambil pembelajaran dari kolaborasi lintas sektor, komunikasi transparan, keterlibatan masyarakat, fleksibilitas kebijakan, dan analisis data yang cermat, Indonesia dapat memperkuat sistem kebijakan publiknya untuk menghadapi tantangan yang kompleks dan dinamis di masa depan.

Daftar Pustaka

- Achmad, F. Y. N. (2021). Penerapan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pada Sistem Pelayanan Publik Dinas Komunikasi Dan Informasi Kota Bau-Bau. *Journal Publicuho*, 4(2), 570–580. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18195>
- Agustino, L. (2020). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(2), 253–270. <https://doi.org/10.24258/jba.v16i2.685>
- Anggraini, B. L., & Kurniawan, B. (2021). Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Di Kabupaten Tuban. *Publika*, 9(2), 309–322. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p309-322>
- Anggraini, H., Zainuddin, Z., & Hartono, B. (2022). Implementasi Kebijakan ASN Sebagai Pelaksana Kebijakan Publik Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah, Provinsi Sumatera Utara. *Journal of Education Humaniora and Social Sciences (Jehss)*, 5(2), 863–875. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1393>
- Arifin, Z. (2021). Penerapan E-Government Dalam Pengembangan Sistem Komunikasi Dan Telematika Pada Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kabupaten Sinjai. *Jurnal Ilmiah Administrasita*, 12(2), 145–159. <https://doi.org/10.47030/administrasita.v12i2.332>
- Aulia, N. R., Mustari, N., & Hartaman, N. (2021). Dinamika Kebijakan Pemerintah Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Covid-19 Di Kota Tarakan. *Kybernan Jurnal Studi Kepemerintahan*, 4(1), 16–25. <https://doi.org/10.35326/kybernan.v4i1.1045>
- Dewi, N. P. A. S., Tirtayani, S. P. L. A., & Suniasih, S. P. D. N. W. (2019). Evaluasi Terhadap Aspek Konteks Pada Program Paud Inklusi Di Kota Denpasar. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Undiksha*, 7(1), 1–12.

<https://doi.org/10.23887/paud.v7i1.18731>

- Dewi, P. S. (2021). Dampak PPKM Terhadap Penurunan Angka Pasien COVID-19 Di Puskesmas Cikalong. *Cerdika Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(9), 1187–1191. <https://doi.org/10.36418/cerdika.v1i9.175>
- Fathurrohman, R., & Rizqi, W. T. (2021). Reorientasi Kebijakan Pendidikan Islam Di Masa Pandemi Covid-19. *Heutagogia Journal of Islamic Education*, 1(2), 227–239. <https://doi.org/10.14421/hjie.2021.12-09>
- Firmansyah, D., Suryana, A., Rifa'i, A. A., Suherman, A., & Susetyo, D. P. (2022). Hexa Helix: Kolaborasi Quadruple Helix Dan Quintuple Helix Innovation Sebagai Solusi Untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 6(4), 476–499. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i4.4602>
- Hermawan, R., Septian, M., & Hayat, H. (2021). Learning Policy Model for Vocational Higher Education After the Covid-19 Pandemic. *Al-Ishlah Jurnal Pendidikan*, 13(3), 2083–2090. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v13i3.1220>
- Ishak, I., Ilham, I., & Sabani, A. (2022). Shari'a Compliance Principles in Financial Technology. *Jurnal Cendekia Hukum*, 8(1), 47–59. <https://doi.org/10.33760/jch.v8i1.542>
- Ismail, M. I., & Ilyas, N. I. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Monalisa (ed.)). Rajawali Pers.
- Kennedy, A. (2023). Hak Asasi Manusia dan Keadilan Bermartabat: Perbandingan Teori dan Realitas di Indonesia. *Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian*, 4(1), 132–141. <https://doi.org/10.31933/ejpp.v4i1.1043>
- Kennedy, A., Surya, W. H., Mustika, S. R., & Wartoyo, F. X. (2024). Sumber-Sumber Hukum Administrasi Negara dalam Kerangka Good Governance di Indonesia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 558–569. <https://doi.org/10.55357/is.v5i2.654>
- Kholiq, A., & Rahmawati, R. (2020). Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19. *El-Barka Journal of Islamic Economics and Business*, 3(2), 282–316. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v3i2.2472>
- Liu, X., Robinson, S. E., & Vedlitz, A. (2017). A Micro Model of Problem Definition and Policy Choice: Issue Image, Issue Association, and Policy Support of Power Plants. *Policy Studies Journal*, 48(1), 11–37. <https://doi.org/10.1111/psj.12233>
- Madani, A. E. (2018). SME Policy: Comparative Analysis of SME Definitions. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(8), 103–114. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i8/4443>
- Marsari, H., Hairani, S., & Gistituati, N. (2021). Model Perumusan Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, 6(1), 89–94. <https://doi.org/10.29210/3003908000>
- Muis, A. R. C. (2020). Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Strategi Nasional Dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19. *Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar I*, 7(5), 439–454. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15317>
- Nursalam, N. (2021). Nilai-Nilai Publik Dalam Kebijakan Pelestarian Cendana (Santalum Album L) Di Kabupaten Timor Tengah Selatan. *Jiapi Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.33830/jiapi.v2i1.59>
- Oktarina, V. R., Warsono, H., Priyadi, B. P., & Kismartini, K. (2021). Pelayanan Publik Dalam Kebijakan Social Distancing Di Kotawaringin Barat. *Sangkep Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 4(1), 47–63. <https://doi.org/10.20414/sangkep.v4i1.2846>
- Oktavia, Y. (2023). Sosialisasi Makanan Sehat Produk Perikanan Pada Siswa Sekolah Dasar Sebagai Cikal Bakal Generasi Tangguh Covid-19 Di Desa Pengujan Kabupaten Bintan. *Journal of Maritime Empowerment*, 6(1), 34–38. <https://doi.org/10.31629/jme.v6i1.6735>

- Pritasari, L. A., & Kusumasari, B. (2019). Actor Intervention in Influencing Environmental Policy Formulation: The Case Study of Shrimp Farming Relocation Policy in Yogyakarta. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(2), 179–198. <https://doi.org/10.24258/jba.v15i2.427>
- Raisa, D. M., Ahmad, A., Nurdin, F., Qinayah, M., Alamsyah, R., & Megawati, M. (2021). Optimalisasi Penerapan Rumah Pangan Lestari Dalam Penyediaan Sayuran Untuk Memperkuat Ketahanan Pangan Di Masa Pandemi COVID-19. *Tarjih Agribusiness Development Journal*, 1(2), 58–63. <https://doi.org/10.47030/tadj.v1i2.302>
- Ristyawati, A. (2020). Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(2), 240–249. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.240-249>
- Saadah, V. (2022). Analisis Activity Based Costing Unit Cost SMA Pasca Covid 19. *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan*, 11(1), 31–38. <https://doi.org/10.24036/jbmp.v11i1.116579>
- Septa, R. R., & Kusumasari, B. (2023). Opini Publik Terkait Tren Isu Kesehatan: Analisis Konten Pada Twitter Dan Portal Berita Di Yogyakarta. *Pesirah Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), 44–65. <https://doi.org/10.47753/pjap.v2i2.34>
- Sista, T. R., & Azhari, R. M. (2022). Analisis Penerapan Kebijakan Social Issolation Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Masa Pandemi Covid-19 Di Universitas Darussalam Gontor. *Edukatif Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(4), 5053–5061. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i4.2827>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2024). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Sonata, D. L. (2015). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15–35. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>
- Subahan, A., Dista, D. X., & Witarsa, R. (2021). Kajian Literatur Tentang Kebijakan Pendidikan Dasar Di Masa Pandemi Dan Dampaknya Terhadap Pembelajaran. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v4i1.1662>
- Sulistyowati, F. (2021). Strategi Komunikasi Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan COVID-19 Pada Majalah TEMPO Edisi Maret-Juli 2020. *Jurnal Riset Komunikasi*, 4(2), 198–214. <https://doi.org/10.38194/jurkom.v4i2.326>
- Sunggono, B. (2019). *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers.
- Suryono, A. (2018). Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat. *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 98–102. <https://doi.org/10.31334/trans.v6i2.33>
- Widyaningrum, N., & Utama, D. B. (2022). Transparansi Publik Dalam Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 Pada Pemerintah Desa. *Jurnal Pelita Kota*, 3(1), 120–129. <https://doi.org/10.51742/pelita.v3i1.461>